

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Dialog politik yang dilakukan oleh politisi merupakan metode komunikasi yang digunakan dalam kampanye. Dialog politik adalah salah satu aktivitas *political public relations*. Kegiatan *political public relations* dilakukan dengan manajemen organisasi yaitu memberikan pengaruh, pembastutan dan membangun hubungan yang saling menguntungkan sehingga tercapainya tujuan untuk mendapatkan kepercayaan publik. *Political public relations* dapat dipahami sebagai proses memberikan pelayanan kepada publik oleh partai politik dan aktor politik. Selain itu *political public relations* juga dilakukan untuk mengelola isu sehingga adanya perhatian oleh masyarakat.

Political public relations memiliki tujuan yang spesifik yaitu untuk menciptakan solidaritas internal organisasi dengan pengoptimalan seluruh komponen organisasi, menjembatani hubungan organisasi dengan publik untuk menumbuhkan rasa saling percaya dan mendapatkan dukungan terhadap program organisasi, mendapatkan informasi baru yang berkembang di masyarakat dan mendapatkan informasi mengenai kelemahan, kekuatan, peluang dan tantangan organisasi dalam hubungannya bersama masyarakat. Tujuan *political public relations* ini dapat dicapai melalui program kampanye yang dilakukan oleh politisi yaitu dialog politik bersama masyarakat.

Fenomena dialog politik dilakukan oleh salah satu politisi perempuan Minangkabau yaitu Cindy Monica Salsabila Setiawan yang dapat dilihat pada unggahan akun *Instagram @cindymonica.id*. Pada unggahan akun tersebut dapat

diketahui bahwa Cindy melakukan kunjungan ke daerah-daerah di Sumatera Barat termasuk daerah terpencil saat melakukan kampanye. Cindy banyak berdialog melalui pertemuan bersama masyarakat dan mendengarkan keluhan masyarakat. Pada salah satu unggahan terlihat Cindy melakukan kampanye dengan tema Dialog Warga di Kota Pariaman, Sumatera Barat. Tujuan Cindy melakukan Dialog Warga adalah untuk memahami kondisi masyarakat secara leluasa dan bebas menyampaikan apa yang menjadi keluhan, kesan, dan harapan masyarakat di masa depan.

Keladiran Cindy dari partai NasDem membuat sejarah baru bagi Sumatera Barat. Dikutip dari laman *website* kompas.com, pada pemilu yang dilaksanakan pada Februari 2024 keterwakilan perempuan di legislatif akhirnya mencapai angka 30% dengan Cindy bersama Cerint menambahkan kursi bagi perempuan Sumatera Barat dan empat orang lainnya merupakan petahana yang mampu mempertahankan kursinya. Tiga perempuan dari Sumatera Barat lainnya yang mewakili untuk DPR RI bersama Cindy yaitu Lisda Hendra Joni (NasDem), Athari Gauthi Aidi (PAN) dan Nevi Zuairina (PKS). Selain itu, perempuan yang berhasil lolos ke DPD RI yaitu Emma Yohanna.

Namun, dilansir dari laman *website* detik.com, Pemungutan Suara Ulang (PSU) DPD-RI di Sumatera Barat dilakukan pada Juli 2024 karena adanya gugatan oleh Irman Gusman ke Mahkamah Konstitusi yaitu salah seorang yang mencalonkan diri untuk DPD-RI di Sumatera Barat. Oleh karena itu, petahana Emma Yohanna gagal meraih kursi DPD-RI di Sumatera Barat sehingga keterwakilan perempuan Sumatera Barat 30% di legislatif menjadi tidak terpenuhi.

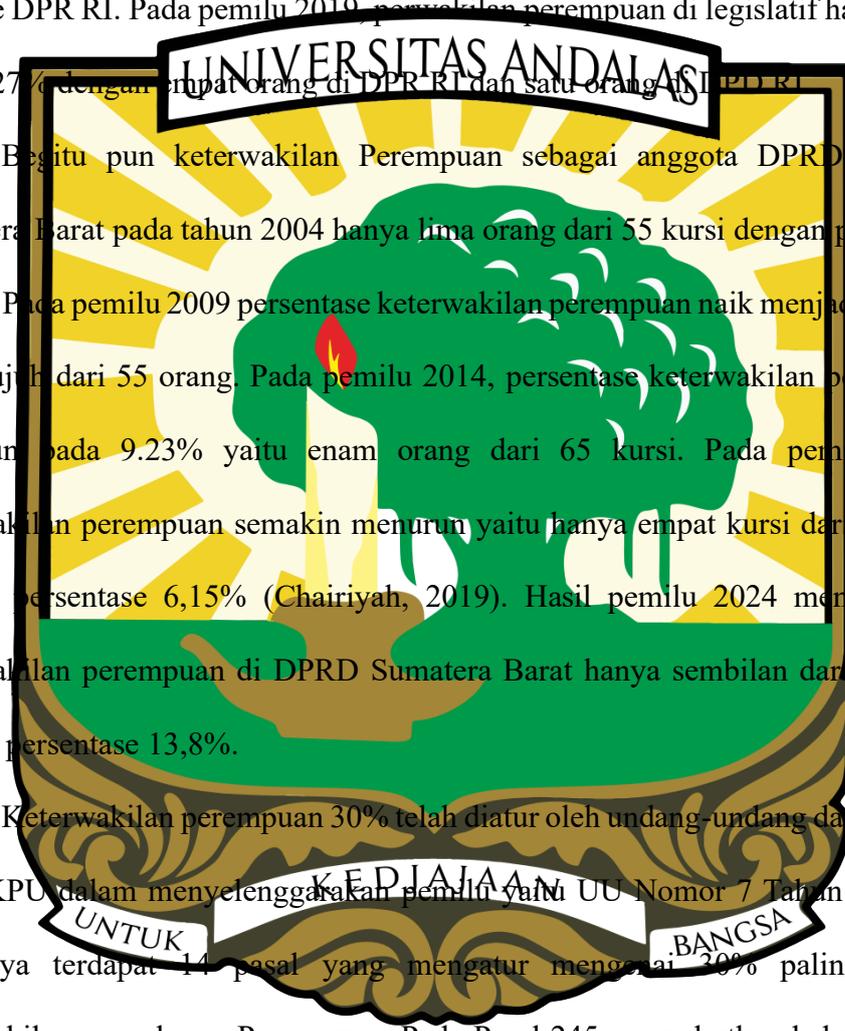


Sejarahinya sejak pemilu pasca-reformasi tahun 1999, kuota 30% keterwakilan perempuan dari Sumatera Barat di legislatif tidak pernah terpenuhi. Pada pemilu tahun 1999 hanya satu perempuan dari Sumatera Barat yang duduk di kursi DPR RI. Pemilu 2004 tidak ada satu pun perempuan Sumatera Barat di DPR RI. Begitu pun pemilu tahun 2009 dan tahun 2014, hanya satu perempuan yang lolos ke DPR RI. Pada pemilu 2019, perwakilan perempuan di legislatif hanya pada angka 27% dengan empat orang di DPR RI dan satu orang di DPRD.

Begitu pun keterwakilan Perempuan sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2004 hanya lima orang dari 55 kursi dengan persentase 9.09%. Pada pemilu 2009 persentase keterwakilan perempuan naik menjadi 12.72% yaitu tujuh dari 55 orang. Pada pemilu 2014, persentase keterwakilan perempuan menurun pada 9.23% yaitu enam orang dari 65 kursi. Pada pemilu 2019, keterwakilan perempuan semakin menurun yaitu hanya empat kursi dari 65 kursi dengan persentase 6,15% (Chairiyah, 2019). Hasil pemilu 2024 menunjukkan keterwakilan perempuan di DPRD Sumatera Barat hanya sembilan dari 65 kursi dengan persentase 13,8%.

Keterwakilan perempuan 30% telah diatur oleh undang-undang dan menjadi dasar KPU dalam menyelenggarakan pemilu yaitu UU Nomor 7 Tahun 2017. Di dalamnya terdapat 14 pasal yang mengatur mengenai 30% paling sedikit keterwakilan pencalonan Perempuan. Pada Pasal 245 menyebutkan bahwa Daftar Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Mencapai 30% keterwakilan perempuan Sumatera Barat di legislatif tentu saja tidak mudah. Hal ini tentu saja disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya



yaitu budaya patriarki yang sangat kuat di masyarakat Minangkabau. Dengan budaya patriarki, laki-laki akan mendominasi untuk seluruh wacana sosial termasuk politik. Budaya patriarki menyebabkan terbatasnya kesempatan bagi perempuan untuk menjadi politisi karena adanya batasan peran perempuan dalam urusan rumah tangga (Parawansa, 2002).

Budaya patriarki yang menjadikan laki-laki berperan sebagai pengambil keputusan menjadi salah satu faktor kebijakan *affirmative action* tidak berjalan dengan baik di Sumatera Barat. Faktor lainnya seperti pendidikan politik yang rendah terutama bagi perempuan, kualifikasi perempuan dalam ranah politik yang masih terbatas, pentingnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif masih belum dirasakan oleh perempuan dan sedikit peluang yang didapatkan kaum perempuan dari elit politik untuk terlibat dalam politik. Namun, unikanya budaya patriarki ini berbanding terbalik dengan adat Matrilineal yang di anut oleh masyarakat Sumatera Barat.

Adat Matrilineal menjadikan perempuan Minangkabau ada di posisi sentral dalam masyarakat. Budayawan AA Navis (1984) menyebutkan bahwa dengan adat Matrilineal, sistem demokratis akan berkembang bagi masyarakat Minangkabau karena adanya budaya egaliter yang akan memunculkan persamaan dan kesamaan bagi manusia sehingga akan ada kesetaraan *gender* di masyarakat (Iskandar, 2023).

Adat Matrilineal menyamakan kedudukan perempuan dan laki-laki secara hukum, sosial dan kebudayaan. Hal ini menjadi penguat posisi perempuan dalam menjalin hubungan bersama masyarakat dan pemangku adat seperti bundo kanduang dan datuak. Fenomena budaya patriarki dan matrilineal ini menarik untuk diteliti keterkaitannya terhadap kehadiran Cindy sebagai perempuan Sumatera Barat di

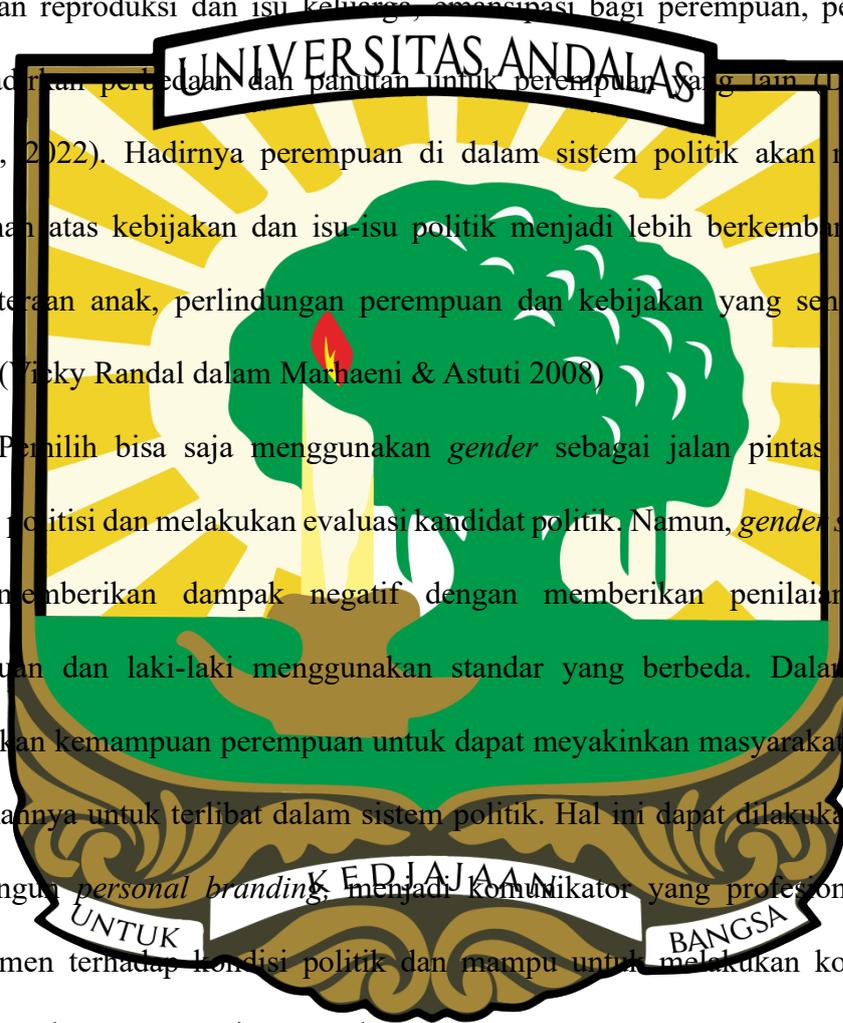


sistem politik. Dengan ini, terlihat cara Cindy memosisikan dirinya sebagai perempuan Minangkabau yang turut serta dalam kontestasi politik dan juga akan menjabarkan pentingnya peran perempuan terlibat dalam membuat kebijakan.

Perempuan harus ada di dalam sistem politik untuk menghadirkan kesetaraan bagi perempuan, pemahaman atas kebutuhan perempuan seperti kesehatan reproduksi dan isu keluarga, empowernya bagi perempuan, perempuan menghadirkan perbedaan dan panutan untuk perempuan yang lain (Deviani & Subono, 2022). Hadirnya perempuan di dalam sistem politik akan membawa perubahan atas kebijakan dan isu-isu politik menjadi lebih berkembang seperti kesejahteraan anak, perlindungan perempuan dan kebijakan yang sensitif pada *gender* (Tiky Randal dalam Marhaeni & Astuti 2008)

Penilih bisa saja menggunakan *gender* sebagai jalan pintas informasi kualitas politisi dan melakukan evaluasi kandidat politik. Namun, *gender stereotype* dapat memberikan dampak negatif dengan memberikan penilaian kepada perempuan dan laki-laki menggunakan standar yang berbeda. Dalam hal ini dibutuhkan kemampuan perempuan untuk dapat meyakinkan masyarakat terhadap kelayakannya untuk terlibat dalam sistem politik. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun *personal branding*, menjadi komunikator yang profesional, dapat berargumen terhadap kondisi politik dan mampu untuk melakukan komunikasi politik untuk mempersuasi masyarakat.

Dalam hal berpartisipasi di dunia politik, perempuan harus memiliki wawasan, mempunyai latar belakang pendidikan dan pengalaman politik dalam memperjuangkan kepentingannya di dunia politik. Perjuangan perempuan untuk menaikkan tingkat keterwakilan perempuan di dunia politik dilakukan karena



berbanding lurus dengan kualitas hidup perempuan. Semakin tinggi tingkat keterwakilan perempuan maka semakin tinggi pula kualitas hidup perempuan. Kesejahteraan perempuan dan skala prioritas terhadap perempuan akan lebih diperjuangkan bila perempuan terlibat langsung sebagai pembuatan kebijakan termasuk realisasi kebijakan tersebut.

Melalui observasi awal penelitian ini, ditemukan bahwa Cindy memiliki potensi-potensi tersebut. Cindy dapat membuat program kampanye yang menunjukkan kelayakannya menjadi pemimpin melalui kunjungan langsung ke 900 titik di Sumatera Barat selama satu tahun untuk melaksanakan dialog politik bersama masyarakat. Dialog yang dilakukan oleh Cindy menerapkan model *Two-Way Symmetrical Communication* pada teori *Public Relations*. Model ini dianggap sebagai model yang paling efektif digunakan dalam melakukan komunikasi. Hasil yang didapatkan dari model ini adalah adanya pemecahan masalah dengan melakukan kompromi bersama. Tidak ada proses persuasi, namun publik menjadi sumber informasi sehingga muncul sistem *take and give*. Model *Two-Way Symmetrical Communication* berusaha untuk membangun pemahaman yang sama di antara komunikator dan komunikan dengan melakukan dialog secara penuh (Kriyantono, 2014).

Dalam praktiknya, penerapan model *Two-Way Symmetrical Communication* menempatkan para politisi berada di pihak publik. Dengan begitu, publik merasa aspirasinya didengarkan dan diberikan solusi melalui kebijakan politisi. Masyarakat sekarang sudah mempertimbangkan kualitas politisi dalam melakukan pemilihan dengan melihat program-program yang ditawarkan. Tidak hanya proses persuasi, namun perlunya dialog antara politisi dan masyarakat agar program dan



kebijakan yang diambil sesuai dengan harapan masyarakat, dengan ini perempuan dapat bersaing bersama laki-laki di dunia politik.

Observasi awal penelitian ini juga menemukan bahwa tidak semua perempuan Minangkabau memiliki kemampuan melakukan dialog bersama masyarakat. Wawancara dilakukan bersama salah satu perempuan anggota DPRD Kota Padang dan ditemukan bahwa tidak adanya penerapan dialog politik bersama masyarakat saat berkampanye. Program kampanye yang dilakukan seperti senam bersama, pengajian, memberikan bantuan seperti *ambulans* dll., komunikasi yang bertujuan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat jarang dilakukan. Hal ini memperkuat argumen bahwa Cindy melakukan hal yang tidak biasanya dilakukan oleh perempuan dalam prosesnya mendapatkan suara dari masyarakat.

Penelitian terdahulu yang menjadi acuan penulisan ini adalah jurnal yang ditulis oleh Akmal Arianto, Lara Indah Yandri dan Eznova Yani pada tahun 2022 dengan judul “Kekuatan Politik Limpapeh Rumah Gadang dalam Lemahnya Regulasi tentang Kuota Keterwakilan Perempuan”. Penelitian ini membahas alasan perempuan mau berada di sistem politik pada level daerah dan level nasional. Selain itu, pada jurnal ini menemukan bagaimana perempuan memaknai politik. Makna politik bagi perempuan Minangkabau adalah kekuasaan, sehingga perempuan harus berani untuk mendapatkan kekuasaan. Pengalaman perempuan dalam berorganisasi, politik maupun dunia kerja juga mempengaruhi bagaimana perempuan memaknai dan memahami politik. Budaya Matrilineal ikut berkontribusi dalam memberikan pemaknaan terhadap politik bagi perempuan Minangkabau serta budaya ini menjadi salah satu alasan perempuan mau ikut serta terlibat dalam dunia politik.



Penelitian ini penting untuk dilakukan karena pemilu 2024 menjadi gebrakan baru bagi perempuan Sumatera Barat khususnya Cindy Monica yang melakukan kampanye dengan metode dialog politik. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti **“Kemampuan *Political Public Relations* Politisi Perempuan Minangkabau dalam Dialog Politik dengan Pemilih pada Pemilu 2024”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah penelitian ini adalah **“Bagaimana kemampuan *political public relations* politisi perempuan Minangkabau dalam dialog politik dengan pemilih pada pemilu 2024?”**

1.3. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pendekatan politisi perempuan Minangkabau yaitu Cindy Monica kepada pemilih pemilu 2024 Kota Pariaman.
2. Menjelaskan program dialog warga dalam kampanye politisi perempuan Minangkabau yaitu Cindy Monica bersama pemilih pemilu 2024 Kota Pariaman.

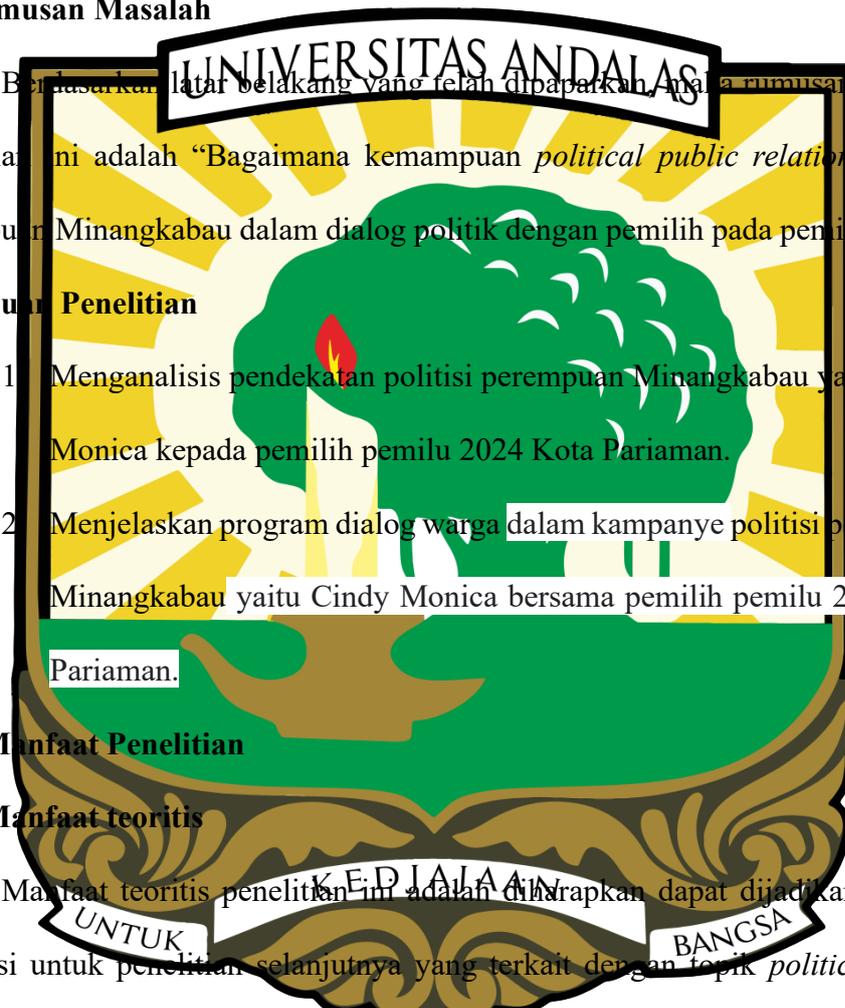
1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini adalah diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang terkait dengan topik *political public relations* terkhusus dialog politik yang dilakukan oleh perempuan terkhusus di Minangkabau.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah diharapkan dapat menjadi motivasi bagi perempuan khususnya di Sumatera Barat untuk ikut serta dalam sistem politik.



Diharapkan kemampuan komunikasi perempuan Minangkabau yang dipaparkan dapat dijadikan acuan bagi politisi perempuan dalam menarik masyarakat sehingga keterwakilan perempuan dalam sistem politik selalu terpenuhi. Penelitian ini juga memberikan pandangan baru bahwa kampanye yang dilakukan tanpa janji politik juga berhasil dilakukan.

